

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya bangsa Indonesia guna memenuhi tujuan pembangunan adalah melalui pembangunan nasional, yakni terwujudnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan konstitusi dan sila kelima Pancasila. Komponen utama dalam pembangunan nasional salah satunya adalah pembangunan daerah. Untuk mengelola pembangunan daerah, pemerintah harus mengambil sejumlah kebijakan keuangan yang akan mengatur seluruh konsep pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didukung oleh berbagai sumber dana yang berasal dari wilayah terkait. Industri pariwisata suatu daerah akan tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam banyak hal, termasuk secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun jika pembangunan tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, maka pembangunan justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit. Penelitian terhadap semua sumber daya yang relevan harus dilakukan sebelum pengembangan pariwisata dapat dimulai untuk menjamin bahwa pariwisata dapat tumbuh dengan sukses dan berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan meminimalkan potensi dampak negatif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam, manusia, dan budaya (Wardiyanta, 2006).

Pembangunan di Indonesia adalah tanggung jawab kedua pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan di setiap wilayah Indonesia untuk memaksimalkan dan memajukan negara. Untuk menjalankan otonomi, daerah membutuhkan dana. Perimbangan finansial antara pusat dan daerah, yang diatur oleh UU No. 33 Tahun 2004, memberi daerah kesempatan yang sangat baik untuk mengelola SDA sebaik mungkin. Memperbesar PAD adalah salah satu cara bagi daerah untuk meningkatkan sumber penerimaannya. Dalam hal dukungan keuangan dan pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah diharapkan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Menurut Artana (2015), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak dan retribusi daerah, serta

pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah secara otonom dan PAD lain yang sah. Memperluas industri pariwisata dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan PAD selain meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, menurunkan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan (Udayantini, et al., 2015).

Suatu daerah mempunyai kebebasan lebih untuk memilih bagaimana melanjutkan pembangunannya apabila semakin tinggi PAD-nya. Meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dan mengembangkan perekonomian setiap daerah merupakan dua tanggung jawab utama setiap pemerintah daerah. Komitmen yang besar terhadap APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerah akan diwujudkan melalui PAD. Berbagai pajak daerah, PAD, kekayaan yang dipisahkan, serta retribusi daerah merupakan komponen PAD (Nilawati, 2019).

Sebagai negara kepulauan, industri pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Berkembangnya industri pariwisata di dunia, selain meningkatkan arus masuk wisatawan asing, secara tidak langsung juga mempengaruhi permintaan penyediaan komponen industri pariwisata. Keberhasilan pengembangan industri pariwisata meningkatkan perannya dalam penerimaan pendapatan daerah, dimana industri pariwisata merupakan komponen utama, serta beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing, infrastruktur dan produk domestik regional bruto, jumlah restoran dan jumlah hotel, (Arraniry, 2018).

Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kabupaten/kota yang menjadikan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomian daerahnya. Salah satunya, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah otonom terus menunjukkan perkembangannya. Industri pariwisata merupakan sektor yang tengah berkembang pesat di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini. Hal ini dikarenakan pariwisata dinilai mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi bagi kelangsungan pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, pariwisata juga menyumbang pendapatan devisa

negara. Sektor pariwisata merupakan industri yang berkaitan dengan perjalanan individu atau sekelompok orang berbagai destinasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan dengan memajukan komunikasi, transportasi, dan penginapan. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

**Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2022 (dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Kenaikan /Penurunan (%)</b>
2017	178.145.381,10	49.81
2018	123.906.524,44	-30.45
2019	135.032.868,84	8.98
2020	132.752.560,09	-1.69
2021	145.028.893,40	9.25
2022	145.637.815,19	0.42

Sumber: BPS Pesisir Selatan Tahun 2023

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa PAD mengalami variasi yang cukup signifikan antara tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, terdapat lonjakan PAD yang cukup besar sebesar 49,81%, yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan daerah, mungkin karena kebijakan fiskal yang efektif atau keberhasilan sektor-sektor unggulan daerah dalam memberikan kontribusi yang signifikan. Kenaikan tersebut bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti adanya peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat atau kemajuan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien.

Namun, setelah pencapaian positif pada 2017, PAD mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2018, dengan penurunan sebesar 30,45%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan kinerja ekonomi daerah, berkurangnya pendapatan dari sektor-sektor utama, atau bahkan perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi sumber pendapatan daerah. Meskipun ada penurunan, pada tahun 2019, PAD kembali meningkat sebesar 8,98%, yang menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan yang berubah. Kenaikan

yang moderat ini menunjukkan bahwa daerah mulai stabil kembali dan berhasil meningkatkan pendapatannya meskipun tantangan ekonomi masih ada.

Pada tahun 2020 hingga 2022, pertumbuhan PAD cenderung lebih stabil, meskipun dengan variasi yang lebih kecil. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tipis sebesar 1,69%, yang bisa jadi dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian secara global dan lokal. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, PAD kembali menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 9,25% dan 0,42%, yang mencerminkan bahwa meskipun tantangan tetap ada, pengelolaan pendapatan daerah mulai stabil dan kembali menunjukkan tren pertumbuhan. Dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih moderat, ini menunjukkan bahwa daerah berhasil mengelola sumber daya dan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan pendapatan meski dalam kondisi yang tidak mudah, seperti krisis kesehatan global.

**Tabel 1. 2 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017–2022**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Mancanegara</b>	<b>Wisatawan Nusantara</b>	<b>Jumlah wisatawan</b>	<b>Persentase Kenaikan/Penurunan (%)</b>
2017	1.700	2.350.000	2.351.700	18,68
2018	1.623	2.479.841	2.481.464	5,52
2019	3.650	2.065.863	2.069.513	-16,60
2020	250	177.033	177.283	-91,43
2021	-	344.197	344.197	94,15
2022	120	942.120	942.240	173,75

Sumber: BPS Pesisir Selatan Tahun 2023

Data yang disajikan menunjukkan tren signifikan dalam jumlah wisatawan dari tahun 2017 hingga 2022. Dari 2017 hingga 2018, terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang positif, dengan total meningkat dari 2.351.700 menjadi 2.481.464, meskipun jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2018. Namun, tahun 2019 mengalami penurunan drastis sebesar 16,60% dalam jumlah total wisatawan, meskipun ada lonjakan jumlah wisatawan mancanegara. Tahun 2020 mencatat dampak paling

besar dari pandemi COVID-19, dengan penurunan drastis sebesar 91,43%, yang membawa total wisatawan menjadi hanya 177.283. Di tahun 2021, pemulihan mulai terlihat dengan kenaikan 94,15%, terutama dari wisatawan nusantara, meskipun tidak ada data untuk wisatawan mancanegara. Pada tahun 2022, sektor pariwisata menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih kuat, dengan total wisatawan mencapai 942.240 dan kenaikan 173,75%, meskipun jumlah wisatawan mancanegara masih rendah. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dampak besar dari pandemi terhadap sektor pariwisata, serta pemulihan yang mulai terjadi, terutama di kalangan wisatawan domestik.

**Tabel 1. 3 Sarana Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017–2022**

Tahun	Sarana Akomodasi Pariwisata		Jumlah Sarana Akomodasi Pariwisata	Persentase kenaikan/penurunan (%)
	Rumah Makan dan Restoran	Hotel dan Penginapan		
2017	144	36	180	0
2018	144	36	180	0
2019	144	36	180	0
2020	163	31	194	7,77
2021	163	64	227	17,10
2022	173	94	267	17,62

Sumber: BPS Pesisir Selatan Tahun 2023

Data mengenai jumlah sarana akomodasi pariwisata yang terdiri dari rumah makan dan restoran, hotel, serta penginapan menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang positif, meskipun dalam beberapa tahun pertama, jumlah sarana akomodasi relatif stabil. Pada periode 2017 hingga 2019, jumlah sarana akomodasi untuk masing-masing kategori rumah makan dan restoran, hotel, serta penginapan tetap tidak berubah, yaitu masing-masing 144 unit untuk rumah makan dan restoran, 36 unit untuk hotel, dan 180 unit untuk penginapan. Stabilitas angka ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi pariwisata mungkin berada dalam fase pemeliharaan atau tidak ada perubahan signifikan dalam permintaan atau kapasitas fasilitas pada periode tersebut.

Namun, mulai tahun 2020, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah sarana akomodasi. Meskipun sektor pariwisata global dan domestik terdampak oleh pandemi COVID-19, jumlah rumah makan dan restoran meningkat

menjadi 163 unit, menunjukkan adanya respon terhadap perubahan pola konsumsi dan permintaan dari pengunjung lokal. Begitu juga dengan hotel dan penginapan, yang masing-masing meningkat menjadi 31 unit dan 194 unit. Pada tahun 2021 dan 2022, tren pertumbuhan semakin terlihat jelas dengan kenaikan masing-masing sebesar 17,10% dan 17,62%. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi, dengan permintaan terhadap sarana akomodasi yang semakin berkembang. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendorong sektor pariwisata serta peningkatan daya tarik wisata daerah yang membuat investasi dalam fasilitas akomodasi menjadi lebih menguntungkan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah kajian ini diantaranya:

- a. Bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan?
- b. Bagaimana pengaruh variabel wisatawan nusantara, rumah makan dan restoran, hotel dan penginapan secara parsial dan simultan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari riset ini, diantaranya:

- 1) Menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Menganalisis pengaruh variabel wisatawan nusantara, rumah makan dan restoran, hotel dan penginapan secara parsial dan simultan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan riset yang akan dilaksanakan nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Analisis yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi para peneliti, khususnya berkaitan dengan bagaimana industri pariwisata mempengaruhi pendapatan asli daerah.

- b. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan penelitian yang telah selesai sebagai sumber informasi dan dukungan ketika mengembangkan kebijakan untuk memajukan industri pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Riset ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan pendapatan daerah.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak mencakup daerah lain di Sumatera Barat.
- b. Analisis data dilakukan pada periode tahun 2005-2022
- c. Analisis tentang variabel wisatawan nusantara, rumah makan dan restoran, hotel dan penginapan, pendapatan asli daerah.

